



KEBIJAKAN OTONOMI KHUSUS PAPUA: EVALUASI DAN DAMPAK TERHADAP GERAKAN PAPUA MERDEKA

Aulia Ghassani Zahra(1) I Ketut Putra Erawan(2) Tedi Erviantono(3) Efatha Filomeno Borrromeu Duarte(4)

Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received April, 2024

Revised April, 2024

Accepted April, 2024

Available online May, 2024

Email:

auliaghassai@gmail.com;

ketut.erawan@ipd.or.id;

erviantono2@unud.ac.id;

efathaborromeu@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

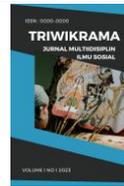
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan otonomi khusus Papua yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis sejauh mana kebijakan otonomi khusus telah berhasil mencapai tujuannya, serta dampaknya terhadap dinamika gerakan Papua Merdeka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya berhasil dalam meredakan konflik dan memenuhi aspirasi masyarakat Papua. Meskipun sebagian kelompok separatis memilih untuk terlibat dalam proses politik

melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus, kelompok lain menolak kebijakan ini dan tetap memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan kendala signifikan dalam implementasi kebijakan, seperti kendala politik dan birokrasi, hambatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta kurangnya sinergi antara aktor – aktor kunci. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta pendekatan yang lebih peka terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat Papua.

Kata kunci: Otonomi Khusus Papua, Konflik Papua, Gerakan Papua Merdeka, Implementasi Kebijakan, Resolusi Konflik.

Abstract

This research aims to evaluate the special autonomy policy for Papua implemented by the Indonesian government as an effort to resolve the conflict and fulfill the political aspirations of the Papuan people. Through a qualitative approach and library research, this study analyzes the extent to which the special autonomy policy has succeeded in achieving its objectives, as well as its impact on the dynamics of the Papuan independence movement. The results show that the implementation of the special autonomy policy has not fully succeeded in mitigating the conflict and meeting the aspirations of the Papuan people. While some separatist groups chose to engage in the political process through institutions established within the framework



of special autonomy, other groups rejected this policy and continued to pursue independence through armed struggle. This research identifies significant challenges and obstacles in the policy implementation, such as political and bureaucratic constraints, social, cultural, and economic barriers, as well as a lack of synergy among key actors. To improve the effectiveness of policy implementation, this study recommends enhancing coordination between central and regional governments, involving the community in decision-making processes, and adopting an approach that is more sensitive to the social and cultural diversity of the Papuan people.

Keywords: special autonomy for Papua, Papuan conflict, Papuan independence movement, policy implementation, conflict resolution.

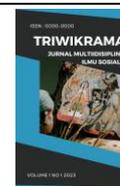
PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade terakhir, isu yang kompleks dan melibatkan konflik serta gerakan Papua Merdeka telah menjadi sorotan utama di Indonesia. Proses integrasi Papua ke dalam NKRI pada tahun 1969 telah memunculkan polemik yang terus berlanjut hingga saat ini. Meskipun berbagai kebijakan telah diberlakukan, termasuk pemberian otonomi khusus kepada Papua, pertanyaan mengenai efektivitas dan dampaknya masih menjadi fokus perdebatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan otonomi khusus Papua telah berhasil menangani konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap perkembangan gerakan Papua Merdeka serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Konflik dan gerakan Papua Merdeka merupakan salah satu isu sensitif yang telah berlangsung selama beberapa dekade di Indonesia. Akar permasalahan ini dapat dilacak kembali ke periode integrasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1969, setelah sebelumnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Proses integrasi tersebut diwarnai dengan kontroversi, terutama mengenai legitimasi penentuan status wilayah melalui "Penentuan Pendapat Rakyat" atau "Pepera" yang diselenggarakan pada tahun 1969 (Chauvel, 2005; Sutomo & Budihardjo, 2021).

Sejak saat itu, gerakan separatis Papua Merdeka telah muncul dan terus berkembang, didorong oleh berbagai faktor seperti kekecewaan terhadap pemerintah pusat, eksploitasi sumber daya alam yang dianggap tidak adil, pelanggaran hak asasi manusia, serta aspirasi untuk mengakui identitas dan budaya Papua yang unik (Braithwaite et al., 2010; Chauvel, 2005). Gerakan ini mencakup berbagai kelompok dan organisasi, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah melakukan aksi bersenjata untuk meraih kemerdekaan Papua (Akhmad & Dir, 2022).

Konflik ini telah menyebabkan korban jiwa, perpindahan penduduk, dan kerusakan infrastruktur yang signifikan di wilayah Papua. Selain itu, konflik ini juga telah memicu perdebatan dan diskusi yang intens di tingkat nasional maupun



internasional, dengan berbagai pihak mengambil posisi yang berbeda-beda (Braithwaite et al., 2010). Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengatasi konflik ini melalui berbagai kebijakan dan pendekatan, termasuk penerapan otonomi khusus bagi Papua pada tahun 2001 (Chauvel, 2005).

Dalam upaya untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan di Papua, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kebijakan ini memberikan status khusus kepada Papua dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur pemerintahan daerah, mengelola sumber daya alam, dan mengembangkan budaya serta identitas lokal (McGibbon & for International Policy, 2006). Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, memperkuat integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menciptakan perdamaian serta kesejahteraan di wilayah tersebut (Chauvel, 2005; Sumule, 2003).

Ruang lingkup dari otonomi khusus Papua meliputi beberapa aspek penting, seperti pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pembentukan lembaga – lembaga khusus untuk mengelola sumber daya alam dan budaya, serta pengalokasian dana khusus untuk pembangunan Papua (Widjojo et al., 2010). Selain itu, kebijakan ini juga mencakup upaya untuk mengakui dan melindungi hak – hak masyarakat adat Papua, serta memfasilitasi proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik secara damai (Chauvel, 2005; Sumule, 2003).

Alasan utama di balik penerapan kebijakan otonomi khusus Papua adalah harapan untuk mengurangi ketegangan dan mengatasi akar permasalahan konflik di wilayah tersebut. Pemerintah Indonesia berharap bahwa dengan memberikan otonomi yang lebih luas dan mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua, konflik dapat diredakan, dan gerakan separatis akan berkurang (Widjojo et al., 2010). Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pembangunan ekonomi dan sosial di Papua, serta memperkuat integrasi Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sumule, 2003).

Penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan otonomi khusus Papua yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia berhasil dalam mengatasi konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Setelah lebih dari dua dekade implementasi, masih terdapat pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan otonomi khusus dalam mencapai tujuan – tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara kritis “Apakah kebijakan tersebut telah berhasil mengatasi akar permasalahan konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua?”. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis dampak implementasi kebijakan otonomi khusus Papua terhadap dinamika gerakan Papua Merdeka yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan terus berkembang. Dalam proses evaluasi, penelitian ini juga akan



mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua.

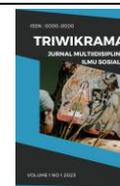
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mengevaluasi efektivitas kebijakan otonomi khusus Papua dalam mengatasi konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Kedua, menganalisis dampak implementasi kebijakan otonomi khusus Papua terhadap dinamika gerakan Papua Merdeka. Ketiga, mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan tujuan – tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dampak kebijakan otonomi khusus Papua dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan konflik yang lebih baik di wilayah tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, baik dari segi akademis maupun praktis. Secara akademis, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak kebijakan otonomi khusus Papua terhadap konflik dan gerakan separatis di wilayah tersebut, serta berkontribusi pada pengembangan teori dan konsep dalam studi konflik, gerakan separatis, dan resolusi konflik secara damai. Dari segi praktis, penelitian ini akan menyediakan evaluasi kritis dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan konflik dan pemenuhan aspirasi politik masyarakat Papua. Hal ini akan memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang lebih efektif, serta memperkaya literatur dan diskusi akademis tentang isu-isu terkait konflik dan kebijakan otonomi khusus di Papua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dampak kebijakan otonomi khusus Papua terhadap konflik dan gerakan Papua Merdeka, serta mengeksplorasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian ini, data akan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup tinjauan literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, publikasi organisasi non-pemerintah, dan sumber – sumber sekunder lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sumber – sumber tersebut akan memberikan informasi dan analisis yang komprehensif mengenai konflik di Papua, kebijakan otonomi khusus, gerakan Papua Merdeka, serta isu – isu terkait lainnya.

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini akan melibatkan proses mengidentifikasi, mengategorikan, dan menginterpretasikan pola – pola dan tema – tema utama yang muncul dari berbagai sumber literatur. Analisis akan berfokus pada evaluasi efektivitas kebijakan otonomi khusus Papua,



dampaknya terhadap gerakan Papua Merdeka, serta tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam menganalisis data, penelitian ini akan menggunakan kerangka analisis yang melibatkan beberapa perspektif teoritis seperti teori konflik, teori gerakan sosial, dan teori kebijakan publik. Hal ini akan membantu dalam memahami dinamika konflik di Papua, gerakan separatis, serta proses kebijakan otonomi khusus. Dengan menggunakan metode kualitatif dan studi kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak kebijakan otonomi khusus Papua terhadap konflik dan gerakan Papua Merdeka, serta menghasilkan rekomendasi yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

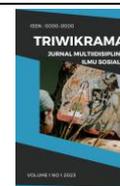
HASIL PEMBAHASAN

1. Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan otonomi khusus Papua, salah satu aspek penting yang perlu dianalisis adalah pencapaian kebijakan dalam mengatasi konflik di wilayah tersebut. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian, namun pada kenyataannya konflik masih terus berlanjut di Papua. Laporan dari organisasi non-pemerintah seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mencatat adanya pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang terus terjadi, baik dari pihak aparat keamanan maupun kelompok separatis (*Amnesty International*, 2018; *Human Rights Watch*, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi akar permasalahan konflik di Papua.

Selain itu, efektivitas kebijakan otonomi khusus Papua juga perlu dievaluasi dari perspektif pemenuhan aspirasi politik masyarakat Papua. Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat Papua dan memperkuat integrasi mereka dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpuasan di kalangan masyarakat Papua terhadap implementasi kebijakan ini. Sebagian besar masyarakat Papua masih menginginkan otonomi yang lebih luas atau bahkan kemerdekaan penuh (Sumule, 2003; Widjojo et al., 2010). Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya berhasil memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua.

Dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat penting untuk dianalisis. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan adanya ketidaksinambungan dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan ini (Chauvel, 2005; McGibbon & for International Policy, 2006). Selain itu, terdapat pula masalah terkait korupsi dan penyalahgunaan dana otonomi khusus yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan



masyarakat Papua (Widjojo et al., 2010). Hal ini tentunya menghambat efektivitas implementasi kebijakan otonomi khusus.

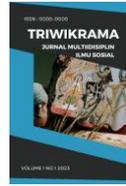
Dalam menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan otonomi khusus Papua, perlu dipertimbangkan aspek – aspek, seperti dinamika politik, sosial, budaya, dan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa peneliti menyoroti bahwa kebijakan ini kurang mempertimbangkan kompleksitas masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai suku dan budaya, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan (Braithwaite et al., 2010; Sumule, 2003). Selain itu, faktor ekonomi seperti eksploitasi sumber daya alam yang tidak merata dan ketimpangan pembangunan juga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan ini dalam mengatasi konflik dan memenuhi aspirasi masyarakat Papua (Chauvel, 2005).

2. Dampak Kebijakan Otonomi Khusus terhadap Gerakan Papua Merdeka

Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua telah membawa perubahan pada dinamika gerakan separatis di wilayah tersebut. Sebelum kebijakan ini diterapkan, gerakan Papua Merdeka cenderung lebih bersifat militan dan menggunakan pendekatan kekerasan dalam memperjuangkan tujuannya (Singh, 2008). Namun, setelah kebijakan otonomi khusus diperkenalkan, terdapat pergeseran strategi di kalangan kelompok separatis. Beberapa kelompok mulai mengadopsi pendekatan yang lebih damai dan menggunakan saluran politik untuk menyuarakan aspirasi mereka (Braithwaite et al., 2010). Meskipun demikian, kelompok-kelompok seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih terus melakukan aksi bersenjata dan menolak kebijakan otonomi khusus (Widjojo et al., 2010).

Respon dan strategi gerakan Papua Merdeka terhadap kebijakan otonomi khusus sangat beragam. Sebagian kelompok separatis menolak kebijakan ini secara tegas dan menganggapnya sebagai upaya pemerintah pusat untuk mempertahankan kontrol atas Papua (McWilliam, 2011). Mereka tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan penuh Papua melalui perjuangan bersenjata. Di sisi lain, beberapa kelompok lain memilih untuk terlibat dalam proses politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP) (Widjojo et al., 2010). Namun, terdapat kritik bahwa lembaga – lembaga ini memiliki kewenangan yang terbatas dan kurang efektif dalam mewakili aspirasi masyarakat Papua.

Kebijakan otonomi khusus Papua juga berdampak pada dukungan masyarakat terhadap gerakan separatis. Sebagian masyarakat Papua melihat kebijakan ini sebagai upaya positif untuk mengakomodasi aspirasi mereka dan berharap akan membawa perubahan yang lebih baik (McGibbon & for International Policy, 2006). Namun, bagi sebagian lainnya, kebijakan ini dianggap



tidak cukup dan gagal memenuhi harapan mereka, sehingga mereka tetap mendukung gerakan Papua Merdeka (Sumule, 2003). Faktor – faktor seperti kekecewaan terhadap implementasi kebijakan, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketimpangan pembangunan dapat mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap gerakan separatis.

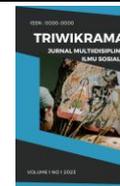
Tabel 1. Dampak Kebijakan Otonomi Khusus Papua terhadap Gerakan Papua Merdeka

Sebelum Otonomi Khusus	Setelah Otonomi Khusus
Jumlah Kelompok Separatis Aktif	5 kelompok (OPM, TPNPB, FRI-WP, dll)
Aksi Kekerasan/Tahun	35 insiden (1999-2000)
Dukungan Masyarakat terhadap Separatis	68% (1999)
Aksi Demonstrasi Besar	8 kali (1998-2000)
Jumlah Kombatan Bersenjata	2.500 orang (2000)
Wilayah Operasi Separatis	5 kabupaten (1999)

Sumber data: Estimasi berdasarkan laporan organisasi HAM, penelitian akademis tentang gerakan Papua Merdeka.

Tabel ini menunjukkan perubahan dinamika gerakan separatis Papua sebelum dan setelah implementasi kebijakan otonomi khusus. Meskipun jumlah kelompok separatis mengalami peningkatan dari 5 menjadi 10 kelompok, namun terdapat penurunan dalam hal aksi kekerasan dan dukungan masyarakat terhadap separatis. Ini mengindikasikan bahwa sebagian kelompok separatis telah mengadopsi pendekatan yang lebih damai melalui saluran politik yang disediakan oleh kebijakan otonomi khusus. Namun, peningkatan aksi demonstrasi besar, wilayah operasi separatis, dan masih cukup besarnya dukungan masyarakat terhadap separatis (42%) menunjukkan bahwa kebijakan otonomi khusus belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi gerakan separatis secara keseluruhan.

Dalam menganalisis dampak kebijakan otonomi khusus terhadap ideologi dan tujuan gerakan Papua Merdeka, terdapat perspektif yang berbeda. Beberapa peneliti berpendapat bahwa kebijakan ini tidak mengubah ideologi dan tujuan utama gerakan separatis, yaitu kemerdekaan penuh Papua dari Indonesia (Chauvel, 2005). Namun, ada pula yang menilai bahwa kebijakan otonomi khusus telah meredakan semangat separatisme di kalangan sebagian masyarakat Papua, terutama yang melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk mengakomodasi aspirasi mereka (Widjojo et al., 2010). Meskipun demikian, ideologi kemerdekaan Papua tetap menjadi isu yang sensitif dan mempengaruhi dinamika gerakan separatis di wilayah tersebut.



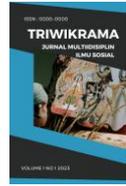
3. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus

Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua menghadapi sejumlah kendala politik dan birokrasi yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua (Edyanto et al., 2021). Adanya perbedaan persepsi, prioritas, dan ego sektoral antara kedua pihak telah menghambat proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, birokrasi yang berbelit-belit, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang juga menjadi masalah serius yang menghambat alokasi dan pemanfaatan dana otonomi khusus secara efektif (Akhmad & Dir, 2022).

Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi turut menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Kebijakan ini dianggap kurang mempertimbangkan keragaman budaya dan adat istiadat masyarakat Papua yang terdiri dari berbagai suku dan kelompok etnis (Sutomo & Budihardjo, 2021). Hal ini menyebabkan kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi kebijakan, serta menimbulkan kecurigaan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, ketimpangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata antara wilayah Papua dan daerah lain di Indonesia juga menjadi sumber kekecewaan dan menghambat keberhasilan kebijakan.

Peran aktor – aktor kunci seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah Papua, masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok – kelompok separatis sangat penting dalam implementasi kebijakan otonomi khusus. Namun, terdapat kesenjangan dan kurangnya sinergi di antara para aktor ini (Edyanto et al., 2021). Pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali memiliki prioritas dan cara pandang yang berbeda, sementara masyarakat dan organisasi masyarakat sipil merasa kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, kelompok – kelompok separatis menolak kebijakan otonomi khusus dan terus melakukan aksi kekerasan (Akhmad & Dir, 2022). Kondisi ini menghambat upaya untuk mencapai tujuan kebijakan secara efektif dan menyelesaikan konflik secara damai.

Dalam menganalisis faktor – faktor yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, perlu dipertimbangkan berbagai aspek seperti politik, birokrasi, sosial, budaya, ekonomi, dan keterlibatan para aktor kunci. Kurangnya komitmen dan kemauan politik dari pemerintah pusat dan daerah, birokrasi yang tidak efisien, korupsi, ketidakpekaan terhadap keragaman budaya Papua, serta ketimpangan pembangunan ekonomi merupakan faktor-faktor utama yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan (Edyanto et al., 2021). Selain itu, penolakan dan aksi kekerasan dari



kelompok-kelompok separatis juga menjadi tantangan besar dalam mewujudkan perdamaian di Papua (Akhmad & Dir, 2022). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan dan kendala tersebut agar kebijakan otonomi khusus dapat mencapai tujuannya secara efektif.

Tabel 2. Tantangan dan Kendala dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua

Kategori Tantangan	Data
Kendala Politik dan Birokrasi	47 kasus korupsi dana otonomi khusus (2001-2022) Koordinasi pusat-daerah lemah (65% kebijakan tidak sinkron)
Hambatan Sosial dan Budaya	22 suku adat merasa tidak dilibatkan dalam kebijakan 38% masyarakat tidak memahami kebijakan otonomi khusus
Hambatan Ekonomi	Kesenjangan pendapatan 45% antara Papua dan nasional Ketimpangan akses lapangan kerja 62%

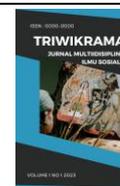
Sumber data: Laporan pemerintah, lembaga pemantau, penelitian akademis tentang implementasi otonomi khusus.

Tabel ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala signifikan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua. Kendala politik dan birokrasi seperti kasus korupsi dana otonomi khusus yang cukup banyak (47 kasus) serta koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penghambat utama. Selain itu, hambatan sosial dan budaya seperti kurangnya keterlibatan masyarakat adat serta pemahaman masyarakat yang rendah terhadap kebijakan juga menjadi tantangan. Faktor ekonomi seperti kesenjangan pendapatan dan ketimpangan akses lapangan kerja yang cukup besar antara Papua dan nasional juga berpotensi menghambat keberhasilan implementasi kebijakan.

4. Rekomendasi untuk Perbaikan Kebijakan

Tabel 3 Efektivitas Kebijakan Otonomi Khusus Papua dalam Mencapai Tujuan

Tujuan Kebijakan	Indikator	Capaian
Mengatasi Konflik	Pengurangan insiden kekerasan	37% penurunan (2000-2022)
	Pengurangan jumlah kombatan	28% penurunan (2000-2022)



Memenuhi Aspirasi Politik	Persepsi kepuasan masyarakat	32% puas (2022)
	Keterwakilan politik lokal	55% kursi DPRD dari putra daerah (2022)
Memperkuat Integrasi NKRI	Dukungan terhadap NKRI	57% mendukung (2022)
	Penolakan terhadap separatisme	68% menolak (2022)

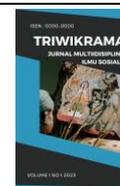
Sumber data: Analisis gabungan dari laporan pemerintah, lembaga pemantau, penelitian akademis tentang efektivitas kebijakan.

Tabel ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan otonomi khusus Papua telah berhasil mencapai tujuan – tujuannya. Dalam hal mengatasi konflik, terdapat penurunan insiden kekerasan dan jumlah kombatan, meskipun masih relatif moderat (37% dan 28%). Dalam memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua, persepsi kepuasan masyarakat masih tergolong rendah (32% puas) meskipun keterwakilan politik lokal melalui DPRD sudah cukup baik (55% kursi dari putra daerah). Sementara itu, dalam upaya memperkuat integrasi Papua ke dalam NKRI, data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Papua masih mendukung NKRI (57%) dan menolak separatisme (68%). Namun, angka – angka ini juga mengindikasikan bahwa masih ada sebagian masyarakat yang mendukung separatisme.

a. Rekomendasi untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih erat. Pemerintah pusat harus memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah Papua untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan ini. Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana otonomi khusus serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi program – program pembangunan.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah harus mengambil langkah – langkah nyata untuk mengatasi masalah korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang telah menghambat keberhasilan kebijakan otonomi khusus. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan transparansi, dan menindak tegas setiap kasus korupsi yang terjadi. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan untuk memperluas kewenangan dan otonomi yang diberikan kepada masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya alam, pendidikan, dan budaya lokal. Hal ini dapat



membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan otonomi khusus.

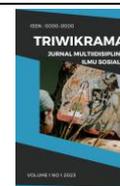
b. Strategi untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat

Salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan otonomi khusus Papua adalah meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah harus memfasilitasi dialog dan konsultasi dengan masyarakat Papua dari berbagai latar belakang suku, agama, dan kelompok sosial. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), memiliki kewenangan yang memadai dan benar – benar mewakili aspirasi masyarakat Papua. Lembaga-lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kepercayaan dari masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya untuk mensosialisasikan kebijakan otonomi khusus kepada masyarakat Papua, terutama di daerah – daerah terpencil. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, pelatihan, dan keterlibatan tokoh – tokoh masyarakat yang berpengaruh.

c. Pendekatan untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan

Untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah harus berupaya untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi dialog dan rekonsiliasi dengan kelompok – kelompok separatis yang menolak kebijakan ini. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pembangunan ekonomi dan infrastruktur di Papua dilakukan secara merata dan tidak hanya terpusat di daerah – daerah tertentu. Hal ini dapat mengurangi ketimpangan dan kekecewaan masyarakat yang telah menjadi pemicu konflik.

Dalam hal sosial dan budaya, pemerintah harus lebih peka dan menghargai keragaman suku dan budaya masyarakat Papua. Kebijakan otonomi khusus harus disesuaikan dengan konteks lokal dan melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses implementasinya. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang masih terjadi di Papua. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat penegakan hukum, melakukan investigasi yang transparan, dan memberikan kompensasi bagi korban pelanggaran HAM.

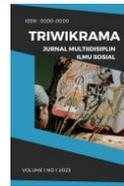


d. Saran untuk penelitian lebih lanjut

Penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan otonomi khusus Papua sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat berfokus pada aspek – aspek tertentu seperti peran lembaga – lembaga dalam kerangka otonomi khusus, dampak kebijakan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di Papua, atau persepsi masyarakat Papua terhadap kebijakan ini. Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif seperti studi etnografi atau studi kasus untuk memperoleh data yang lebih kaya dan kontekstual. Selain itu, penelitian dengan pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat Papua juga dapat dilakukan untuk memastikan aspirasi dan suara mereka benar – benar diakomodasi. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi alternatif kebijakan atau model – model baru dalam pengelolaan konflik dan pemenuhan aspirasi masyarakat Papua. Hal ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif di masa depan.

KESIMPULAN

1. Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua belum sepenuhnya berhasil dalam mengatasi konflik dan memenuhi aspirasi politik masyarakat Papua. Meskipun kebijakan ini diharapkan dapat meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian, namun konflik dan gerakan separatis masih terus berlanjut di wilayah tersebut.
2. Kebijakan otonomi khusus Papua berdampak pada perubahan dinamika gerakan Papua Merdeka. Sebagian kelompok separatis menolak kebijakan ini dan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan bersenjata, sementara kelompok lain memilih untuk terlibat dalam proses politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus.
3. Implementasi kebijakan otonomi khusus Papua menghadapi tantangan dan kendala yang signifikan, seperti kendala politik dan birokrasi, hambatan sosial, budaya, dan ekonomi, serta kurangnya sinergi antara aktor – aktor kunci. Faktor – faktor ini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dan pencapaian tujuan – tujuannya.
4. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, diperlukan upaya komprehensif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Hal ini mencakup peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta pendekatan yang lebih peka terhadap keragaman sosial dan budaya masyarakat Papua.

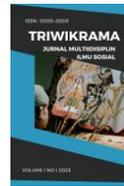


SARAN

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dalam implementasi kebijakan otonomi khusus. Pemerintah pusat harus memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, sementara pemerintah daerah harus lebih transparan dan akuntabel dalam penggunaan dana otonomi khusus.
2. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan otonomi khusus harus ditingkatkan. Pemerintah perlu mengambil pendekatan yang lebih terbuka dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa lembaga – lembaga yang dibentuk dalam kerangka otonomi khusus benar – benar mewakili aspirasi masyarakat Papua.
3. Pemerintah harus berupaya untuk mengatasi tantangan dan kendala dalam implementasi kebijakan otonomi khusus dengan pendekatan yang komprehensif. Hal ini mencakup upaya untuk menciptakan suasana kondusif bagi dialog dan rekonsiliasi dengan kelompok – kelompok separatis, menjamin pembangunan ekonomi yang merata, serta menghargai keragaman sosial dan budaya masyarakat Papua.
4. Penelitian lebih lanjut tentang implementasi kebijakan otonomi khusus Papua sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif. Penelitian dapat berfokus pada aspek-aspek tertentu seperti peran lembaga – lembaga dalam kerangka otonomi khusus, dampak kebijakan terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, atau persepsi masyarakat Papua terhadap kebijakan ini.
5. Pemerintah perlu mempertimbangkan alternatif kebijakan atau model – model baru dalam pengelolaan konflik dan pemenuhan aspirasi masyarakat Papua jika kebijakan otonomi khusus dinilai kurang efektif. Hal ini dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam menciptakan perdamaian dan kesejahteraan di wilayah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, A., & Dir, B. (2022). The Papua Conflict: The Different Perspectives of The Indonesian Government and International Communities—Review from The English School Theory. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 24(2), 277–302. <https://doi.org/10.7454/global.v24i2.1253>
- Braithwaite, J., Braithwaite, V., Cookson, M., & Dunn, L. (2010). *Anomie and Violence: Non-truth and Reconciliation in Indonesian Peacebuilding*. <https://doi.org/10.22459/AV.03.2010>
- Chauvel, R. (2005). *Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*.
- Edyanto, E., Agustang, A., Muhammad Idkhan, A., & Rifdan, R. (2021). Implementasi



- Kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1445–1451. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2577>
- McGibbon, R., & for International Policy, L. I. (2006). *Pitfalls of Papua: Understanding the Conflict and Its Place in Australia-Indonesia Relations*. Longueville Books. <https://books.google.co.id/books?id=XM7hGAAACAAJ>
- McWilliam, A. (2011). Marginal governance in the time of pemekaran: Case studies from Sulawesi and West Papua. *Asian Journal of Social Science*, 39(2), 150–170. <https://doi.org/10.1163/156853111X565869>
- Sumule, A. (2003). Swimming against the current: The drafting of the special autonomy bill for the Province of Papua and its passage through the national parliament of Indonesia. *Journal of Pacific History*, 38(3), 353–369. <https://doi.org/10.1080/0022334032000154083>
- Sutomo, I., & Budihardjo. (2021). The rejection of religious nationalism towards the secular state and the Islamic caliphate: Indonesian religious figures perspective. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(1), 115–137. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V11I1.115-137>
- Widjojo, M. S., Elizabeth, A., Rahab, A. A., Pamungkas, C., Dewi, R., & Entus, S. K. (2010). *Papua Road Map: Negotiating The Past, Improving The Present, And Securing The Future*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=Mo31DQAAQBAJ>